

Pancasila Sebagai Dasar Anti Korupsi

Mohammad Khoiron 'Azami

Program Studi Teknik Mesin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mohammadkhoirona@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, pendidikan anti korupsi, integritas, karakter bangsa, moral

Keywords:

Pancasila, anti-corruption education, integrity, national character, moral

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah yang mendasar, yang menghambat kemajuan bangsa, merusak hubungan sosial, dan melemahkan demokrasi. Di Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta merusak nilai moral dalam masyarakat. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, memiliki nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang dapat menjadi dasar kuat dalam upaya mencegah dan mengatasi korupsi. Artikel ini membahas secara mendalam dengan menganalisis delapan jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai

yang bisa diterapkan dalam kebijakan publik, pendidikan, penegakan hukum, dan pengembangan budaya anti korupsi. Penelitian ini juga menekankan bahwa pendidikan yang berlandaskan nilai Pancasila dan penguatan moral adalah langkah penting dalam membentuk masyarakat yang memiliki integritas. Dengan menerapkan nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat memperkuat sistem antikorupsi secara komprehensif, baik secara struktural maupun aktual.

ABSTRACT

Corruption is a fundamental problem that hinders national progress, damages social relations, and undermines democracy. In Indonesia, corruption not only harms state finances but also erodes public trust in the government and undermines moral values within society. Pancasila, as the foundation of the state and the nation's way of life, encompasses moral, ethical, and spiritual values that can serve as a strong foundation for preventing and overcoming corruption. This article examines this issue in depth by analyzing six published scientific journals. The results show that each principle of Pancasila has values that can be applied to public policy, education, law enforcement, and the development of an anti-corruption culture. This study also emphasizes that education based on Pancasila values and moral strengthening are crucial steps in shaping a society with integrity. By consistently implementing Pancasila values, Indonesia can strengthen its anti-corruption system comprehensively, both structurally and actually.

Pendahuluan

Korupsi adalah tindakan kejahatan yang sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat. Di Indonesia, korupsi sudah menyebar ke berbagai bidang, seperti pemerintahan pusat dan daerah, serta lembaga pendidikan dan layanan publik. Dampaknya tidak hanya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

merugikan secara materi, tetapi juga merusak nilai-nilai moral bangsa yang seharusnya menjadi dasar dalam pembangunan.

Laboratorium Ekonomi UGM mencatat kerugian ekonomi yang disebabkan oleh korupsi mencapai Rp509,57 triliun. Angka ini menunjukkan seberapa besar pengaruh tindakan korupsi terhadap perekonomian negara (Mulyoto, 2020). Selain itu, ICW menyampaikan bahwa selama tahun 2022 terdapat 612 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 triliun (Pasya Salsa Balesta, 2024). Data tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan masalah nasional yang memerlukan pendekatan komprehensif.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) turun dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada 2024, menunjukkan adanya penurunan integritas masyarakat dan birokrasi c. Artinya, korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga oleh lemahnya karakter moral bangsa.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila hadir sebagai pedoman pokok yang menuntun pembentukan moral individu maupun sistem sosial. (Priatmoko, 2022) menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi moral bangsa yang harus diinternalisasikan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sejalan dengan pandangan tersebut, (Nurhalizah, 2019) menekankan bahwa setiap aspek kehidupan bangsa, termasuk upaya membangun sistem yang bebas dari korupsi, seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut (Nasoha, Ahmad, Muhammad et al., 2024) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar moral dan filosofis dalam pembentukan hukum yang adil serta memiliki integritas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh (Aninda, 2017) menyatakan bahwa pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap generasi muda dalam melawan tindakan korupsi. Karena nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi dasar yang kuat dalam mengatasi korupsi dari segi struktur dan budaya.

Pembahasan

Pancasila sebagai Fondasi Moral untuk Pencegahan Korupsi

Pancasila memiliki nilai-nilai moral dasar yang membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Menurut (Abdillah & Firdaus, 2025), Pancasila merupakan pedoman moral yang mengatur hubungan antara warga negara satu sama lain, antara warga dengan pemerintah, serta antarlembaga negara. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan tugas negara harus mematuhi nilai-nilai tersebut agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi.

(Anti Putri et al., 2025) menyatakan bahwa sikap moral dan etika mahasiswa yang didasarkan pada nilai Pancasila berkaitan dengan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab, membuktikan bahwa penerapan nilai Pancasila secara dalam dapat mencegah terjadinya penyimpangan moral dari awal. Sementara itu, (Aninda, 2017) menyebutkan bahwa membiasakan sikap toleran dan menjunjung tinggi nilai moral dalam kehidupan sosial adalah bagian yang sangat penting dari nilai-nilai Pancasila. Karakter moral ini juga berfungsi sebagai pelindung utama melawan tindakan korupsi yang bermula dari penurunan moral.

Pancasila tidak hanya mengatur norma dalam negara, tetapi membentuk sistem nilai yang membentuk integritas individu dan bangsa.

Analisis Nilai-Nilai Pancasila dalam Pencegahan Korupsi

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan pentingnya nilai kejujuran, amanah, dan moralitas spiritual. (Nurhalizah, 2019) menegaskan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena mengabaikan kejujuran, tanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. (Anti Putri et al., 2025) menambahkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi terbukti membantu seseorang mengendalikan diri lebih baik dan mengurangi kemungkinan melakukan tindakan tidak etis, seperti korupsi, karena individu tersebut merasa diawasi oleh nilai moral yang lebih kuat dibandingkan hanya aturan hukum negara.

Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Korupsi merupakan tindakan tidak beradab karena merampas hak masyarakat. (Nasoha, Ahmad, Muhammad et al., 2024) Menekankan pentingnya menjaga martabat setiap individu serta menentang segala bentuk ketidakadilan, termasuk korupsi yang merugikan hak orang lain. Korupsi sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena uang publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dicuri untuk keuntungan pribadi. Nilai-nilai kemanusiaan ini mendorong pemerintah dan sistem hukum untuk tidak hanya menangani pelaku korupsi, tetapi juga memperbaiki hak-hak korban serta masyarakat yang terkena dampaknya.

Sila 3: Persatuan Indonesia

Korupsi memecah belah bangsa dan merusak kepercayaan rakyat kepada negara. (Abdillah & Firdaus, 2025) hal-hal penting tentang nilai dan keyakinan rakyat Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Salah satu hal utama dalam membangun sebuah bangsa adalah persatuan. Nilai gotong royongbekerja sama antar warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan bangsa membangun rasa bangsa yang kuat, mengatasi perbedaan, dan mencapai kesatuan. Menghargai perbedaan menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang kuat. Sila ketiga ini mengharuskan para pejabat negara lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan persatuan bangsa.

Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan

Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang sehat, prinsip musyawarah, serta kebijaksanaan. Korupsi dalam bentuk politik uang dapat menghancurkan sistem demokrasi. (Ubaidillah, 2017) menegaskan bahwa politik uang merupakan ancaman terbesar dalam proses pemilihan umum. Pemimpin yang terpilih karena uang tidak akan memperhatikan kepentingan rakyat, melainkan hanya membalas budi kepada pemberi

dana. Sila keempat memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan demokrasi yang bersih.

Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial tidak mungkin terwujud jika korupsi masih berkembang luas. Korupsi menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan menghambat distribusi keadilan sosial yang merata. (Aninda, 2017) menunjukkan bahwa generasi muda yang memahami nilai sila kelima lebih sensitif terhadap ketidakadilan sosial dan lebih menolak perilaku koruptif. Sila kelima bertindak sebagai dasar etika yang menentang korupsi dan berfokus pada kesejahteraan nasional.

Strategi Implementasi Pancasila dalam Sistem Antikorupsi Nasional

Pendidikan Antikorupsi Berbasis Pancasila

(Mulyoto, 2020) menegaskan bahwa penggunaan modul *Project Citizen* dalam pembelajaran Pancasila membantu mahasiswa mempelajari bagaimana menjadi warga negara yang mampu mengawasi dan memengaruhi kebijakan publik, terutama dalam memperkuat nilai-nilai anti korupsi serta mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan prinsip ilmu pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan kerja sama melalui kegiatan belajar yang berbasis praktik empirik. Modul praktikum berbasis project citizen memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis, berdialog, bernegosiasi, bekerja sama, bersikap sopan, toleran, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan warga negara demi kebaikan bersama. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menantang, aktif, dan bermakna

Penegakan Hukum yang Konsisten dan Berkeadilan

Menurut (Nasoha, Ahmad, Muhammad et al., 2024) agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pendidikan memainkan peran yang sangat penting. Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan nasional dapat menyertakan nilai-nilai Pancasila. Dengan pembinaan nilai-nilai moral, etika, serta keadilan yang sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila, mahasiswa dapat dilatih agar menjadi warga negara yang kuat dalam menghadapi masalah korupsi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi disusun guna memperkuat peran Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia:

Pertama, Penguatan regulasi dan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila: Pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap peraturan dan kebijakan dalam bidang pemberantasan korupsi selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ini meliputi perbaikan dalam perundang-undangan yang mendorong transparansi,

akuntabilitas, serta keadilan dalam pengelolaan keuangan negara, serta kebijakan penegakan hukum yang adil dan tidak memperbeda-bedakan.

Kedua, Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri: Aparatur negara, termasuk para penegak hukum, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang memperkuat integritas dan etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Program pelatihan ini dirancang untuk membantu mereka memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip Pancasila serta cara menerapkannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Ketiga, Meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Keterbukaan informasi serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik, pemerintah dapat memperkuat transparansi dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam sila keempat Pancasila.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Transparansi publik merupakan bentuk konkret dari nilai kerakyatan yang dijalankan dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam proses musyawaratan serta perwakilan. Partisipasi masyarakat dan pengawasan dari publik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Langkah ini dapat dijalankan dengan menerapkan keterbukaan data pemerintah, yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran negara secara langsung. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks ini, strategi-strategi tersebut relevan dengan teori perilaku antikorupsi yang menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan partisipasi publik. Teori ini juga mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta keadilan sosial ke dalam strategi pencegahan korupsi, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih berintegritas dan lebih responsif terhadap berbagai masalah korupsi (Pasya Salsa Balesta, 2024).

Pemberdayaan Masyarakat

Kesadaran dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Langkah pertama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai tindakan korupsi kepada pihak yang bertugas disebut sebagai pelaporan kasus korupsi. Salah satu cara efektif dalam menghilangkan korupsi adalah dengan melaporkan tindakan korupsi tersebut. Kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, upaya ini memerlukan partisipasi yang kuat dari berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Yang

kedua yaitu kerja sama antara masyarakat dan lembaga penegak anti korupsi dapat memperkuat upaya dalam pemberantasan korupsi. Program pelapor anonim yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan contoh dari kolaborasi yang dilakukan. Masalah yang sering muncul dalam kolaborasi tersebut adalah adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Korupsi adalah masalah yang mendasar dan menghambat proses pembangunan, merusak sistem sosial, melemahkan demokrasi, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. Angka kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah yang melibatkan seluruh bangsa, tidak hanya akibat ketidakmampuan sistem hukum, tetapi juga karena kurangnya nilai moral dan karakter bangsa. Di tengah situasi ini, Pancasila hadir sebagai dasar filosofis, etika, dan moral yang mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara struktural dan budaya. Berdasarkan penelitian dalam berbagai jurnal, setiap sila Pancasila memuat nilai-nilai yang sangat relevan dalam menangani korupsi: Sila pertama menekankan kejujuran, ketaatan, dan nilai spiritual sebagai fondasi dari integritas seseorang, Sila kedua menolak segala bentuk ketidakadilan dan tindakan tidak sopan, termasuk praktik korupsi, Sila ketiga menegaskan bahwa korupsi adalah ancaman langsung terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi yang jujur, bebas dari politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, Sila kelima menuntut adanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan yang tidak mungkin tercapai jika korupsi masih berlangsung.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pondasi moral dan etika nasional yang mampu menjadi instrumen efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Implementasi Pancasila yang konsisten dalam pendidikan, kebijakan publik, penegakan hukum, serta budaya sosial dapat membentuk ekosistem pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berintegritas.

Saran

1. Penguatan Pendidikan Antikorupsi Berbasis Pancasila yaitu Pendidikan nilai Pancasila harus lebih dalam terintegrasi dalam seluruh tingkatan pendidikan, terutama melalui pendekatan berbasis pengalaman seperti Project Citizen. Pembelajaran harus fokus pada pengembangan sifat jujur, tanggung jawab, etika dalam masyarakat, serta keberanian untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Peningkatan Pelatihan Etika dan Integritas bagi Aparatur Negara. ASN, termasuk pegawai penegak hukum, harus menerima pelatihan terus-menerus mengenai nilai-nilai Pancasila dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pelatihan tersebut juga harus dilengkapi dengan evaluasi terhadap integritas secara rutin, sehingga nilai-nilai tersebut dapat benar-benar diterapkan dan diinternalisasi dengan baik dalam sikap dan perilaku mereka.

3. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Tidak Pandang Bulu dengan menerapkan hukum dengan berlandaskan prinsip keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Tindakan hukum terhadap orang yang melakukan korupsi harus mampu memberikan pelajaran dan diterapkan secara adil tanpa memperhatikan perbedaan.
4. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik dengan memperluas penerapan data terbuka, digitalisasi layanan publik, serta pengawasan yang berbasis teknologi bertujuan untuk membatasi ruang bagi tindakan korupsi. Transparansi merupakan bagian dari nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila
5. Peningkatan Peran dan Partisipasi Masyarakat, masyarakat perlu didorong untuk secara aktif melaporkan tindakan korupsi melalui saluran resmi seperti sistem pelaporan whistleblowing. Selain itu, organisasi masyarakat sipil juga harus terlibat dalam mengawasi kebijakan serta anggaran yang digunakan pemerintah.
6. Pembinaan Moral dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Sosial dengan membudayakan gotong royong, keteladanan seorang pemimpin, serta kebiasaan bersikap jujur perlu dikembangkan melalui keluarga, sekolah, media, dan komunitas. Budaya yang mengizinkan korupsi harus diganti dengan budaya rasa malu dan penolakan terhadap perilaku tidak etis.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., & Firdaus, M. H. (2025). Penerapan nilai pancasila dalam ekosistem ekonomi digital : Studi kasus start-up Indonesia. 3, 630–641.
- Aninda, C. A. (2017). Pancasila Values in the Study of Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Scientia Indonesia*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.15294/jsi.v3i1.36013>
- Anti Putri, V. F., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <https://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Nasoha, Ahmad, Muhammad, M., Atqiya, Ashfia, N., Ulfyah, Alfi, R., & Rohmah, Aulia, N. (2024). Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 113–122. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>
- Nurhalizah, S. (2019). Pancasila dan Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(31), 595–603.
- Pasya Salsa Balesta. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(11), 316–331. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/851>

Priatmoko, Sigit (2022) *Pancasila & moral kita*. <https://repository.uin-malang.ac.id/11487/>
Ubaidillah, A. (2017). *Pancasila, demokrasi, & pencegahan korupsi*.